

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abrar Saleng. (2004). *Hukum Pertambangan*. UII Press. Yogyakarta.

Adrian Sutedi. (2022). *Hukum pertambangan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Teuku Saiful Bahri Johan. (2022). Bab, IV, Dan Yuridis Sosiologis. "A. *Landasan Filosofis,*" *Sosiologis, Dan Yuridis*. Grup penerbit CV budi utama. yogyakarta

Barkatullah, A. H. (2019). *Buku Ajar Hukum Pertambangan: Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam*. Nusamedia. Bandung.

Brigita Purnawati Manohara, & Abrar Saleng. (2023). *Perkembangan Pengelolaan Sektor Hulu Minyak dan Gas Indonesia*. (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers). Depok.

George C. Edward III, (1980), *Buku Implementing Public Policy. In the next four chapters we shall attempt to answer these important questions by considering four critical factors or variables in implementing public policy : communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure*. Congressional Quarterly Press. Washinton, D.C

Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.

James E. Anderson. (2009). *Dalam buku yang sama mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam bidang kegiatan tertentu*. Graha ilmu. Yogyakarta.

Kelsen, H. (2019). *Pengantar Teori Hukum*. Nusamedia. Bandung.

Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2021). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Andi CV. Andi offset. Yogyakarta.

Survono, A. (2010). *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Universitas Brawijaya Press. Malang.

ong, H. (2009). *Teori, Ekonomi Sumberdaya Manusia "Kebijakan Publik"*. Graha ilmu. Yogyakarta.



- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Media Pressindo (CAPS). Yogyakarta.
- Wahid, A. M. Y., & Si SH, M. (2018). *Pengantar Hukum Lingkungan* (Ed. 2). Kencana. Jakarta.
- Weber, M. (2019). BAB IV Teori Pengawasan Kekuasaan. In *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. (p. 81) SIGn. Makassar.
- Wilkenfeld, Jonathan, Kathleen Young, David Quinn, dan Victor Asal, (2007), *Mediating international crises*. (Routledge). London
- Zulkifli Aspan, S. H. (2021). *Amdal Izin Lingkungan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Mega cakrawala. Yogyakarta.

## B. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Arsyad, Didi Rukmana, Darmawan Salman, dan Ilham Alimuddin. (2020). "*Potensi ekonomi dan manfaat hidrologis pertambangan pasir Sungai Sadang di Pinrang Sulawesi Selatan*," Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan.
- Djafar, E. M., Widayanti, T. F., Saidi, M. D., & Muin, A. M. (2023). Forest management to achieve sustainable forestry policy in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, MCLXXXI, 12021.
- Firmansyah, Arif, (2012). "*Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian di Indonesia*," Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.
- Hidayati, Helma. (2022). "*Pengaruh dan Dampak dari pertambangan terhadap lingkungan dan sosial*." Universitas lambung mangkurat.
- Irwansyah, S H, M H Dr Zulkifli Aspan, M H SH, Muhammad Ilham Arisaputra, M Kn SH, S H Maskun, et al., (2017). "*Sumber Daya Alam*". Universitas Hasanuddin.
- Julitra, Yesi, Rosi L Vini Siregar, dan Desy Afrita. (2022). "*Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*." Jurnal Teknik Kimia .USU.



- 10, Drajat Tri, dan Hanif Nurcholis, (2016) "*Konsep dan Teori Pembangunan*," *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*.

IPEM4542/M.

Mine, Coal, Dan Free Area. (2023). *Implementation Of Law Against Regulation No . 12 Of 2013 Concerning The Establishment Of Balikpapan City As.*

Pranyoto, S Pi, dan M AP. (2024). *Blue horizons: Menavigasi kebijakan publik untuk melindungi dan memulihkan ekosistem perairan.* (Indonesia Emas Group).

Satriawan, Desman Diri, (2021). "Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Esensi Hukum* 3.2.

Shaji, J, dan R Anilkuar. (2014). *Socio-environmental impact of river sand mining: an example from Neyyar River, Thiruvananthapuram District of Kerala, India.* *IOSR Journal Of Humanities and Social Science.*

Yoshanda, A. A. (2020). *Pendapatan Nasional.* *Pendapatan Nasional.* Universitas muhammadiyah sidoarjo.

### C. Undang-Undang Dan Yurisprudensi

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah." Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," Jakarta: Sekretariat Negara, 2009

Indonesia, Republik. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan hidup, dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL),” Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), 4M*



Indonesia, Republik. (2018). *“Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.* Berita Negara RI.

Indonesia, Republik. (2018). *“Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.”* Berita Negara RI.

#### **D. Data / Wawancara**

Naim. (2024). Berdasarkan Hasil Penelitian Dalam Hal Ini Wawancara Dengan Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah, di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Pinrang.

Ibrahim. (2024). Hal ini juga diperjelas dari wawancara dengan kepala desa massewae menjelaskan mengenai *besaran nilai ekonomi yang didapat oleh masyarakat sekitar dari penyediaan jasa tersebut dapat dihitung dengan menggunakan sejumlah asumsi, antara lain terdapat 80 perusahaan pertambangan, setiap perusahaan terdiri dari 3 orang tenaga kerja.* Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang.

Sabir. H. (2024). wawancara dengan salasatu pemilik perusahaan menyatakan bahwa *“sesuai dengan aturan saya mempekerjakan masyarakat lokal dan membantu masyarakat disini itu kewajiban perusahaan”* di Desa Massewae kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Baharuddin. (2024). Hal ini juga diperjelas salasatu masyarakat di sekitar tambang, *(setelah adanya tambang saya melihat kondisi keramaian di kampung semakin hari semakin ramai, karena banyak pekerja dari luar, jadi saya berani buka usaha.* Pinrang.

Anto. (2024). Hasil wawancara dengan salasatu pekerja diperusahaan, yang menyatakan *“bahwa waktu masih pengangguran hanya mengandalkan panggilan kerja buruh tani yang sifatnya kelompok atau minta bantuan dari segi penghasilan (pembeli rokok)”*. Pinrang.



Adrian. (2024). Begitu pula diperjelas dengan masyarakat sekitar tambang, menyatakan bahwa *(semenjak ada tambang, alhamdulillah usaha bengkel dan lass lancar, karena mobil-mobil truk kalau bermasalah ban dan dump nya, insyallah saya yang dipanggil untuk perbaiki)*. Pinrang.

Samsu alam. (2024). *Hasil wawancara dengan penanggungjawab BPJS KEMENAKER Prov SUL-SEL Cabang Kabupaten Pinrang*

